

# PERSPEKTIF LAHAN RAWA SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DUNIA

Muhammad Noor dan Mukhlis

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Email: m\_noor\_balittra@yahoo.co.id

## RINGKASAN

Pemerintah telah menyusun rencana dan peta jalan (*road map*) serta rancang bangun (*grand design*) untuk menjadi Lumbung Pangan Dunia (LPD) pada tahun 2045. Meskipun disadari, target untuk mencapai LPD tersebut akan menemui permasalahan yang cukup kompleks, pemerintah tetap menunjukkan keseriusannya melalui berbagai program seperti UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi, Jagung dan kedelai); SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting); SERGAP (Serapan Gabah Petani); ASTAN (Asuransi Petani) untuk peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Lahan rawa adalah salah satu agroekosistem yang maha luas dapat menjadi tumpuan untuk mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai LPD pada tahun 2045. Melalui optimasi lahan rawa akan diperoleh tambahan produksi sekitar 67,54 juta ton gabah/tahun. Dukungan yang diperlukan adalah komitmen yang kuat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, motivasi pelaku terutama petani dan penyuluh di lapangan, gerakan bersama semua pihak terkait, dan implementasi perencanaan sesuai dengan prioritas, langkah, dan tahapan, serta fokus.

## I. PENDAHULUAN

INDONESIA pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1985 dan 2008, tetapi setahun kemudian setelah tahun 1986 dan 2009 kembali menjadi importir. Namun tekad pemerintah untuk mencapai kembali swasembada tidak pernah padam. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian khususnya dan Pemerintah Indonesia umumnya, antara lain perbaikan infrastruktur pertanian (misalnya saluran irigasi, dam parit, tabat, embung, sumur dangkal); penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian (misalnya traktor, *excavator*, mesin tanam, mesin panen, pompa air), bantuan benih unggul, subsidi pupuk, dan asuransi petani. Kementerian Pertanian juga melibatkan aparat TNI dalam kerja sama pengawalan dan percepatan peningkatan luas tanam (LTT) serta pembelian gabah petani (SERGAB) oleh Bulog. Disiapkannya asuransi pertanian bagi petani yang gagal panen. Upaya-upaya di atas sudah mulai menunjukkan hasilnya. Dalam dua tahun terakhir (2016-2017) Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras, kecuali hanya untuk memenuhi Cadangan Beras Nasional (Tempo 2018).

Ke depan pemerintah telah menyusun (*road map*) serta (*grand design*) untuk menjadi LPD pada tahun 2045. Dalam rencana jangka panjang—sesuai *Nawacita*—pemerintah telah menyusun rancang bangun dan peta jalan melalui program jangka pendek (tahunan) dan jangka menengah (5 tahunan) untuk mencapai swasembada dan ekspor terhadap delapan komoditas pangan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, gula (tebu), bawang merah, cabai, bawang putih, dan daging sapi sehingga pada tahun 2045—bertepatan satu abad Kemerdekaan Indonesia—Indonesia menjadi LPD (Kementan 2017).

Di tengah program inisiasi pembangunan pertanian seperti UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai); SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting); SERGAP (Serap Gabah Petani); ASTAN (Asuransi Petani) untuk peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani muncul masalah-masalah baru, antara lain pupuk palsu, pestisida palsu, beras plastik, mafia pangan, dan impor ilegal. Sementara masalah-masalah klasik seperti degradasi lahan, krisis air, kekeringan, kebakaran lahan, banjir, longsor, konversi lahan sawah, perubahan iklim (seperti *El-Nino* tahun 2015) dan serangan hama wereng (seperti pertengahan tahun 2017) senantiasa terus mengintai, sehingga juga patut mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, sebagian orang mempertanyakan

tentang keseriusan pemerintah ataukah hanya mimpi di siang bolong untuk menjadikan Indonesia sebagai LPD.

Dilema petani sebagaimana dikatakan Wolf (1983) dalam bukunya *Petani, Suatu Tinjauan Antropologis* bahwa gagalnya atau lambannya pembangunan pertanian bukanlah sebab petani yang tidak mau berubah, tetapi lebih sebagai akibat. Oleh karena itu, permasalahannya bukan pada petani, tetapi situasi dan kondisi yang sering disebut dengan “sistem” yang mengikat dan menjerat petani sehingga tidak mempunyai daya dan semangat untuk meningkatkan produksi dan kehidupannya. Permasalahan pangan memang sangat kompleks dan rumit seperti dikemukakan Milikan dan Hapgood (1972) dalam laporan panjangnya yang berjudul *Dilemma Pertanian di Negara-negara Berkembang*, yang mengemukakan tentang lika-liku pembangunan pertanian di negara-negara terbelakang sehingga disimpulkan bahwa “Tidak Ada Panen yang Gampang atau *No Easy Harvest*”. Namun demikian, bukan hal yang mustahil, usaha pertanian di Indonesia menjadi sebuah *success story* karena didukung oleh sumber daya lahan, di antaranya lahan rawa, inovasi teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan, dan kelembagaan yang mumpuni menjadikan Indonesia benar-benar sebagai Lumbung Pangan Dunia.

Tulisan ini mengemukakan tentang semangat dan aksi pemerintah dalam tahapan menuju Lumbung Pangan (Nasional) Berkelanjutan dan LPD melalui optimalisasi lahan rawa.

## **II. MENJADIKAN RAWA SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DUNIA**

Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dideklarasikan pertama kali tahun 1945 dan diperingati setiap tahun di seluruh dunia pada tanggal 16 Oktober. Pada peringatan HPS ke-38 secara nasional yang ditempatkan di lahan rawa Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada tanggal 18 Oktober 2018 menjadi momentum untuk menguatkan cita-cita besar pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian untuk menjadikan Indonesia sebagai LPD pada tahun 2045 bertepatan dengan satu abad Kemerdekaan Indonesia. Gelar teknologi di lokasi HPS di atas ditambah dengan gelar teknologi inovasi pengelolaan lahan untuk tipikal rawa lebak di Taman Sains Pertanian (TSP) Lahan Rawa, Banjarbaru (Kalsel) memperkuat semangat pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan lahan rawa yang selama ini belum banyak disentuh.

Menjadikan lahan rawa yang maha luas sebagai lumbung pangan bukan saja pilihan, tetapi tuntutan karena desakan tingginya pertumbuhan penduduk, yaitu sekitar 3 juta/tahun dan pesatnya konversi lahan yang rata-rata hampir 100 ribu hektar/tahun. Namun upaya menjadikan lahan rawa sebagai lumbung pangan juga bukan hal yang mudah—semudah membalik telapak tangan—tentu memerlukan perencanaan yang tepat dan jitu.

Potensi lahan rawa memang maha luas sekitar 34,12 juta hektar tersebar di tiga pulau besar Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Namun di antaranya baru sekitar 2,27 juta hektar yang dibuka pemerintah secara terintegrasi dengan program transmigrasi dan 3,00 juta hektar dibuka oleh masyarakat setempat secara swadaya. Pembukaan lahan rawa di atas umumnya untuk budi daya padi. Menurut Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP 2016) luas lahan rawa yang potensial untuk tanaman pangan (padi sawah) mencapai 14,18 juta hektar. Diperkirakan baru sekitar 6,0-6,5 juta hektar yang telah dimanfaatkan dan hanya sekitar 3,0-3,5 juta hektar yang menjadi sawah atau lahan untuk padi selebihnya masih berupa semak belukar, hutan sekunder atau rawa monoton yang tergenang sepanjang tahun.

Berdasarkan analisis potensi dari Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP 2011), kontribusi tambahan produksi gabah dari lahan rawa yang tersebar di sepuluh provinsi melalui:

- (1) Perluasan areal dengan dasar terdapat sekitar 1.110.494 hektar lahan rawa yang sudah dibuka, tetapi belum dimanfaatkan, apabila kemudian ditanami padi dengan IP 100 dan produktivitas 3,0 t gabah kering giling (GKG)/ha, maka diperoleh tambahan produksi sebanyak 3,33 juta t GKG/tahun;
- (2) Peningkatan produktivitas apabila dilakukan di areal 899.823 ha rawa pasang surut dan 259.533 ha rawa lebak dengan melalui pemberian input yang cukup sehingga produktivitas meningkat dari 3,0 t GKG/ha menjadi 5,0 ton GKG/ha, maka diperoleh tambahan produksi sebanyak 1,74 juta t GKG/tahun;
- (3) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200 pada luas lahan sekitar 3,0 juta hektar, dengan asumsi produktivitas 5,0 t GKG/ha, maka diproyeksi tambahan hasil masing-masing 2,70 juta t GKG/tahun di lahan rawa pasang surut dan 0,78 juta t GKG/tahun di lahan rawa lebak sehingga total tambahan produksi sebesar 3,48 juta t GKG/tahun (Tabel 1).

**Tabel 1.** Perkiraan kontribusi tambahan produksi padi di lahan rawa dari sepuluh provinsi terpilih di Indonesia\*)

Tipologi Rawa	Tambahan Produksi dari Optimasi (t GKG/ha)			Jumlah Tambahan Produksi (t GKG/ha)
	Perluasan Areal	Peningkatan Produktivitas	Peningkatan Indeks Pertanaman	
Pasang surut	2.439.858	1.349.734	2.699.469	6.489.061
Lebak	891.624	389.299	778.899	2.059.822
Jumlah	3.331.482	1.739.033	3.478.368	8.548.883

\*) Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar, Sulbar, Sulteng  
 Sumber: BBSDLP (2011)

Optimasi pemanfaatan lahan rawa melalui peningkatan luas areal, produktivitas dan intensitas pertanaman pada luas lahan rawa 1,1 juta hektar dapat diperoleh tambahan produksi sekitar 8,55 juta ton gabah/tahun. Padahal terdapat sekitar 14,18 juta hektar lahan rawa yang berpotensi dari 34,12 juta hektar lahan rawa sehingga apabila diasumsikan 50% (7,9 juta hektar) saja areal yang potensial dioptimasi sebagaimana di atas, maka diperoleh tambahan produksi sekitar 67,54 juta ton gabah/tahun—sebuah angka—sulit untuk dibayangkan.

Kembali kepada gerakan petani dan pemerintah kiranya patut dan layak sebagai pembelajaran untuk menuju Lumbung Pangan Berkelanjutan dan pada gilirannya mendukung tercapainya tujuan jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai LPD pada tahun 2045. Berbagai pihak diperlukan untuk bergerak dari daerah rawa masing-masing yang tersebar di 18 provinsi dan hampir 300 daerah kabupaten/kota menuju peta jalan LPD 2045 melalui dibangunnya Model Pertanian Lahan Rawa Terpadu (MPRT). Dukungan yang diperlukan antara lain:

1. **Komitmen otoritas.** Pemerintah pusat dan daerah sebagai pemegang otoritas menunjukkan komitmen sangat kuat, yang tampak dalam dukungan (i) alokasi anggaran dan/atau program; (ii) sistem pendukung pengelolaan tampak dalam pengarahannya segenap jajaran pemerintah (SKPD) untuk turun berpartisipasi, termasuk TNI dan POLRI; (iii) sistem pengelolaan (*management*) yang utuh, terpadu dan tertib dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berjalan secara simultan dan serentak.

2. **Motivasi para pelaku.** Sinergitas dan kinerja petani dan petugas di lapangan berjalan dengan baik karena didorong adanya (i) insentif produksi; (ii) pasar produk yang jelas, (iii) bimbingan dan penyuluhan melalui pelatihan, percontohan, dan dukungan fasilitas lainnya; (iv) perubahan motif usaha dari subsistem menjadi komersial; (v) bantuan sarana dan prasarana: jalan usahatani, transportasi, dan input produksi; dan (vi) bantuan modal/investasi (alokasi dana sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas).
3. **Gerakan bersama.** Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) mulai dari Menteri, Gubernur, Panglima, Kasad, Kapolri, turun ke Bupati/Wali Kota, Dandim, Kapolres dan jajarannya bersama masyarakat petani ditumbuhkan melalui adanya (i) keselarasan, sinergisme antara *stakeholders* dengan pemerintah, perusahaan swasta, masyarakat pelaksana, termasuk LSM; (ii) kebanggaan bersama, rasa memiliki, dan (iii) adanya tujuan bersama yang kuat meski program berbeda untuk menjadikan Indonesia sebagai LPD dan kembali sebagai negara agraris yang disegani.
4. **Peta Jalan.** Prioritas, langkah, tahapan, dan fokus dalam implementasi perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin (i) keberlanjutan program yang didukung oleh perencanaan yang holistik, berdampak luas, dan mempunyai *time horizon* atau target-progres yang sesuai; (ii) fokus atau terukur dan terarah; (iii) dukungan aspek legal formal untuk jaminan keamanan dan kenyamanan; dan (iv) tahapan pencapaian target program hingga terbentuknya sumber pertumbuhan ekonomi baru.

### III. PENUTUP

**Petani** sebagai pelaku merupakan komponen paling strategis, perlu dipersiapkan dengan baik. Selain itu, menyangkut aspek teknis perlu diperbaiki, sedangkan aspek *entrepreneurships* dan *manajerial* perlu diperkuat. Pengembangan pertanian dalam pikiran petani kecil-tradisional lebih merupakan seni daripada ilmu. Namun kita ingin memadukan antara seni dan ilmu dalam satu kesatuan gerakan untuk menuju LPD.

Sebagaimana diketahui bahwa lahan rawa mempunyai keberagaman tidak saja aspek teknis, tetapi juga aspek sosial ekonomi dan adat budaya sehingga diperlukan pendekatan yang tepat dan tetap memerhatikan

kearifan lokal masyarakat. Berdasarkan pengalaman dari berbagai kegiatan program pengembangan di lahan rawa diperlukan pendekatan *adaptive management* agar keberlanjutan setelah masa program selesai tetapi dilanjutkan oleh masyarakat. (Djufry 2019).

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian. 2011. *State of the Art & Grand Design Pengembangan Lahan Rawa*. Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian. Bogor
- Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian. 2016. *Sumber Daya Lahan Pertanian Indonesia*. AARD-Press. Bogor.
- Buch, R. 2001. *Dua Tongkol Jagung. Pedoman Pengembang Pertanian pada Rakyat*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kementan. 2017. *Sukses Swasembada: Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Milikan, Max F. dan D. Hapgood. 1972. *Dilema Pertanian di Negara-negara Terbelakang*. Dirjendik, Depdikbud & Konsorsium PT. Jakarta.
- Tempo. 2018. *Kisruh Impor Beras*. Edisi 22-28 Januari 2018.
- Wolf, E. R. 1983. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Rajawali Pers.